

**PENATAAN KAWASAN DESA DIRGAHAYU KECAMATAN PULAU
LAUT UTARA YANG LAYAK HUNI DAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN KOTABARU**

***STRUCTURING A LIVABLE AND SUSTAINABLE DIRGAHAYU
VILLAGE AREA IN PULAU LAUT UTARA DISTRICT
KOTABARU REGENCY***

Ina Revayanti

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota ; Fakultas Teknik, Perencanaan
dan Arsitektur ; Universitas Winaya Mukti, Bandung
e-mail: inarevayanti74@gmail.com

Abstrak

Masalah permukiman kumuh hingga saat ini masih menjadi masalah utama yang dihadapi terutama di kawasan permukiman perkotaan. Tingginya arus urbanisasi akibat menumpuknya sumber mata pencaharian di kawasan perkotaan menjadi magnet yang cukup kuat bagi masyarakat perdesaan untuk bekerja di kawasan perkantoran dan industri sehingga rela tinggal di lahan-lahan ilegal yang dekat dengan pusat kota, hingga akhirnya menciptakan lingkungan permukiman kumuh yang tidak layak huni. Desa/Kelurahan Dirgahayu RT.16 berada di pusat kota di sepanjang pesisir pantai, menjadi kawasan strategis tujuan para pencari kerja tersebut. Dalam kajian ini menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif untuk menghasilkan solusi dalam merubah permukiman kumuh menjadi layak huni dan berkelanjutan. Konsep dan rencana pembangunan kawasan permukiman prioritas mencoba merumuskan program pengembangan permukiman menjadi lebih baik dan layak huni serta berkelanjutan guna mendukung kegiatan ekonomi dan sosial warga setempat.

Kata Kunci : *Desa Dirgahayu, Layak Huni, Berkelanjutan.*

Abstract

The issue of slums is still a major problem today, especially in urban settlements. The high flow of urbanization due to the accumulation of livelihood sources in urban areas is a strong enough magnet for rural communities to work in office and industrial areas so that they are willing to live on illegal lands near the city center, which eventually creates an uninhabitable slum environment. Dirgahayu RT.16 is located in the center of the city along the coast, becoming a strategic area for job seekers. This study uses qualitative and quantitative analysis methods to develop solutions to transform slums into livable and sustainable settlements. The concept and development plan of priority settlement areas tries to formulate a settlement development program to be better and livable and sustainable to support the economic and social activities of local residents.

Keywords : *Dirgahayu Village, Livable, Sustainable.*

1. PENDAHULUAN

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Kotabaru cukup beragam. Wilayah di sebelah barat terdapat pegunungan Meratus yang memanjang sampai ke wilayah Kalimantan Timur. Wilayah antara pegunungan dan daerah pantai merupakan daerah landai sampai bergelombang. Daerah pesisir kebanyakan tertutup hutan bakau dan hutan rawa. Daerah pegunungan Meratus dan Pulau Laut Tengah merupakan kawasan yang bergelombang hingga terjal. Secara umum konfigurasi medan wilayah Kabupaten Kotabaru miring ke arah timur.

Desa di wilayah kecamatan Pulau Laut Utara dan di Kecamatan Pulau Laut Sigam semuanya sudah teridentifikasi dalam kategori kumuh, yaitu ada 6 Desa/Kelurahan yang masuk dalam kategori penanganan kumuh atau peningkatan dan 15 desa masuk dalam kategori pencegahan. Permukiman kumuh di Kabupaten Kotabaru terkonsentrasi di pusat kota yang merupakan daerah pinggiran pantai, kawasan perdagangan dan industri. Karena kepadatan penduduknya yang tinggi dan berada dipusat kota disepanjang pesisir pantai sehingga menyebabkan terjadinya permukiman kumuh. Kegiatan ekonomi dan sosial banyak terjadi dipusat kota sehingga masyarakat yang berdomisili di daerah tersebut membangun permukiman baru yang bisa menyebabkan kepadatan penduduk.

Jumlah penduduk Kabupaten Kotabaru hasil Proyeksi Penduduk adalah 329.641 jiwa yang tersebar di terbesar di 198 desa dan 4 Kelurahan. Jumlah penduduk terbesar masih berada di Kecamatan Pulau laut Utara dengan 53.9739 jiwa. (Sumber Kotabaru dalam angka Tahun 2024). Jumlah penduduk yang begitu besar dan terus bertambah setiap tahun tidak diimbangi dengan penyebaran penduduk mengakibatkan kepadatan penduduk di Kecamatan Pulau Laut Utara menjadi sangat tinggi sehingga menyebabkan kekumuhan di wilayah Kecamatan Pulau laut Utara.

Sebaran permukiman kumuh di Wilayah Kabupaten Kotabaru baik berdasarkan lokasi maupun luasan untuk setiap kawasan memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga dalam upaya penanganannya juga memerlukan sebuah proses yang berbeda diantara kawasan. Hal ini disebabkan Wilayah Kabupaten Kotabaru mempunyai fungsi sebagai kawasan strategis untuk tingkat Nasional maupun provinsi dan Kabupaten.

Penentuan kawasan kumuh berdasarkan (SK) Kumuh Provinsi Kalimantan Selatan No.188.44/0420/KUM/2022 tentang Lokasi Permukiman Kumuh, di Kabupaten Kotabaru terdapat salah satu wilayah melalui pertimbangan dan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut yakni Desa/Kelurahan Dirgahayu RT.16 Kecamatan Pulau Laut Utara sebagai lokasi kawasan prioritas wilayah perencanaan di Kabupaten Kotabaru. Teridentifikasi permukiman untuk kawasan prioritas dengan luas sekitar 6,3 Ha.

Tujuan penataan kawasan prioritas Desa/Kelurahan Dirgahayu RT.16 Kecamatan Laut Utara Kabupaten Kotabaru, antara lain :

- Bersama-sama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh;

- Untuk meningkatkan kualitas lingkungan kawasan kumuh menjadi kawasan yang lebih sehat, layak huni dan berkelanjutan;
- Mewujudkan pemahaman infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera.

2. METODE PENELITIAN

Metode Partisipatif dilakukan sebagai suatu proses dimana pihak-pihak terlibat akan saling mempengaruhi dan bertukar kontrol atas inisiatif pembangunan dan keputusan serta sumberdaya yang berpengaruh terhadapnya. Dalam metode ini melibatkan masyarakat dan seluruh stakeholder yang terkait yang terdiri dari kelompok pemerintah, swasta, dan masyarakat umum. Metode lainnya adalah *Metode Community Action Plan (CAP)*, yakni salah satu bentuk pendekatan perencanaan partisipatif pada kawasan prioritas. Rencana aksi program ini meliputi infrastruktur keciptakaryaannya maupun komponen sektor terkait lainnya, dan disusun sampai dengan tingkat kedalaman yang bersifat operasional yang siap diimplementasikan pada tahun berikutnya.

Sumber Data

Sumber Data dalam kajian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi pengamatan langsung dan wawancara masyarakat sekitar di lokasi studi yakni Kawasan Desa/Kelurahan Dirgahayu RT.16 Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Sedangkan Data Sekunder diperoleh dari hasil studi yang telah dilakukan yang berkaitan dengan kajian penataan kawasan kumuh perkotaan seperti buku, artikel, isu dan potensi serta dokumentasi lainnya.

Metoda Analisis

Analisis dalam kajian ini dilakukan menggunakan dua metode yakni analisis kualitatif untuk memperlakukan data kualitatif, dan analisis kuantitatif untuk memperlakukan data kuantitatif yang kedua-duanya diperoleh baik dari hasil survei primer maupun sekunder. Selain itu, metode analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi kewilayahan berdasarkan hasil survei primer maupun data sekunder yang didapat. Seperti juga metoda analisis kualitatif, metoda analisis yang digunakan dalam menganalisis data kuantitatif yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Kewilayahan

Berkembangnya permukiman di Desa Dirgahayu RT.16 terjadi pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya di sekitar sempadan pantai, memiliki jumlah penduduk sebanyak 440 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 160 jiwa/Ha. Jumlah bangunan yang berada di kawasan kumuh sebanyak 110 unit dengan tingkat kepadatan mencapai 32 unit. Tipologi Bangunan, tipikal kondisi bangunan hunian kurang tertata dengan baik, sebagian besar jenis rumah yang ada di Desa Dirgahayu RT.16 yaitu rumah panggung berdinding kayu, berada

diatas laut dengan tata letak yang tidak beraturan dan sangat padat. Selain itu, tidak memiliki proteksi kebakaran.



Gambar 1 Bangunan Hunian Desa Dirgahayu RT 16 berada di atas laut di sekitar sempadan pantai

Sebagian besar Jalan lingkungan yang ada di Desa Dirgahayu RT 16 sudah terlihat baik, dengan panjang jalan sekitar 100 m dan lebar 1,5 meter. Sirkulasi jalan sudah saling terhubung namun jalur jalan tidak beraturan, mengikuti kepemilikan lahan hunian. Bangunan atau hunian yang berada di bibir pantai dibangun titian kayu sebagai jalan lingkungannya, hanya sebagian kecil kondisi jalan sudah di beton dan paving blok.



Gambar 2 Jalan Lingkungan Perkerasan Beton dan Titian Kayu

Di Desa Dirgahayu khususnya di RT.16 tidak terdapat jaringan drainase, air limbah rumah tangga, baik limbah padat maupun limbah cair langsung mengalir ke pantai karena tidak memiliki Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL).



Gambar 3 Limbah rumah tangga langsung mengalir ke tanah

Kebutuhan air bersih di Desa Dirgahayu dipenuhi oleh PDAM. Selain air bersih dari PDAM, masyarakat juga memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan lainnya.



Gambar 4 Tangki Air Bersih di Desa Dirgahayu

Pengelolaan persampahan di Desa Dirgahayu secara umum sudah dilakukan, sampah di angkut seminggu dua kali setiap hari senin dan kamis, namun belum memiliki Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) sehingga sampah di kumpulkan dalam bak sampah berukuran besar di sudut desa yang berada di jalan utama sepanjang jalan kabupaten atau dibakar di tempat terbuka. Selain itu, kesadaran warga setempat belum sepenuhnya terbentuk, terlihat masih ada warga yang membuang sampahnya langsung ke laut.



Gambar 5 Bak Sampah di Jalan Utama

3.2 Konsep dan Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru

Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2011 pasal 97, konsep peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh disusun berdasarkan hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan masing-masing kawasan kumuh dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Secara makro, konsep peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kabupaten yang diterapkan untuk kawasan kumuh oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

- Pemugaran;
- Peremajaan; dan
- Permukiman Kembali (Relokasi).

Adanya konsep pemugaran, peremajaan dan relokasi di Desa Dirgahayu RT.16 yang merupakan kawasan permukiman kumuh ringan di perkotaan dengan tingkat kepadatan tinggi, juga merupakan kawasan pesisir pantai/nelayan, dengan karakter pola permukiman barak, perlu penataan fasade bangunan, sistem drainase, penataan fasilitas air bersih, serta sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang tidak standar teknis sehingga memerlukan pembangunan tangki septik tank/bio fill sebagai pengelolaan air limbah khususnya permukiman di atas air, kebakaran yang pernah terjadi diperlukan penanganan dengan adanya konsep pembangunan hidran umum di jalan lingkungan (gang) yang tidak bisa dijangkau oleh truk pemadam kebakaran.

Dalam Penanganan Kawasan Permukiman Rencana Kawasan Kumuh Desa Dirgahayu RT.16 Kecamatan Pulau Laut Utara, dengan aspek yang diamati permasalahan yang ada, konsep penanganan dan strategi tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 1 Aspek Konsep dan Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru

Kawasan Kumuh	Tipologi	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi	
				Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
Desa Dirgahayu RT.16 Kelurahan Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru	Permukiman berada di Perkotaan di Pesisir Pantai	Bangunan Gedung	>90 % Bangunan Tidak Memiliki IMB	Pengawasan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengaturan Bangunan	Sosialisasi Dan Pendekatan Kepada Masyarakat Mengenai Mendirikan Bangunan Yang Tidak Sesuai Peruntukannya Melakukan Inventarisasi Kepemilikan Lahan-Lahan Kosong Yang Mencakup Data Pemilik Lahan, Status Kepemilikan Dan Luas Lahan.	Pemindahan / Relokasi Secara Bertahap Dan Terbatas Pada Permukiman Yang Tidak Memiliki IMB
			65% Bangunan Permukiman Tidak Teratur	Pengendalian Dan Pengawasan	Pengaturan Bangunan	Sosialisasi Dan Pendekatan Kepada Masyarakat Mengenai Aturan Sempadan Pantai	Pemindahan Dan Relokasi Serta Dilakukan Pembangunan Perumahan Pada Kawasan Yang Sesuai Peruntukannya
		Jalan Lingkungan	>40% Jalan Buruk/Rusak	Pemeliharaan Dan Pengawasan	Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan	Sosialisasi Dan Pengawasan Pemeliharaan Jalan	Perbaikan Jalan Setapak yang dibangun dari kayu
			Jalan Tidak Dilengkapi Saluran Drainase			Ditangani Agar Tidak Kembali Menjadi Kumuh Melalui Upaya : Pengawasan	Penambahan Lampu Jalan

Kawasan Kumuh	Tipologi	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi	
				Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
						Dan Pengendalian; Dan Pemberdayaan Masyarakat	
		Air Minum	Kawasan Terlayani Jaringan Perpipaan	Pemeliharaan Serta Pengawasan	Pengaturan Sistem Perpipaan Jaringan Pipa Air Bersih	Sosialisasi Dan Pendampingan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Air Bersih	Pembangunan Dan Peningkatan Jaringan Air Bersih Terutama Jaringan Induknya Untuk Melayani Masyarakat Untuk Memudahkan Penduduk Dalam Memperoleh Air Minum.
		Drainase Lingkungan	Tidak terbangun	Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran	Sosialisasi Dan Pendampingan	Pembangunan Sistem Saluran Drainase
		Air Limbah	Tidak terbangun	Pemeliharaan Dan Aturan Pengendalian	Pemugaran Pengaturan Sistem Jaringan Air Limbah	Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Upaya Pemeliharaan Pembuangan Air Limbah	Pembuatan Ipal Komunal
		Persampahan	Kawasan Terlayani Oleh Sistem Pengelolaan Persampahan Kota	Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Serta Pengawasan	Peningkatan Kualitas Lingkungan	Sosialisasi Dan Pendekatan Kepada Masyarakat Mengenai Aturan Pembuangan Sampah Agar Tidak Timbul Banjir	Penambahan Tong Sampah Di Tiap Rumah Tangga
		Sistem Proteksi Kebakaran	0% Kawasan Belum Terlayani Oleh Sistem Proteksi Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat	Pengaturan Sistem Jaringan Hidran Untuk Kebakaran	Sosialisasi Pendekatan Kepada Masyarakat Tindakan Awal Pencegahan Kebakaran	Penyediaan Alat Pemadam Kebakaran (APAR)

Sumber: Hasil analisis, 2024

3.2 Program dan Kegiatan Penanganan Kumuh Terkait Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

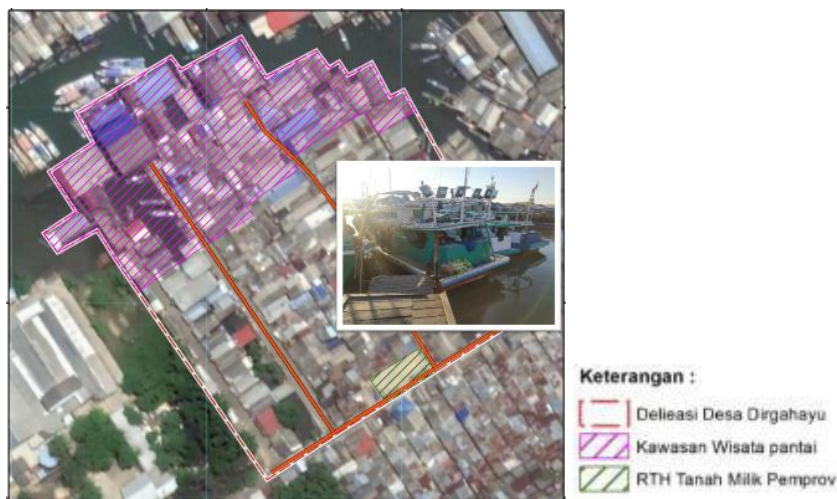
Perumusan rencana aksi program pembangunan permukiman merupakan kegiatan untuk merumuskan konsep dan rencana penanganan kawasan permukiman prioritas yang didasarkan pada hasil identifikasi kebutuhan penanganan kawasan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Rumusan rencana aksi tersebut merupakan keluaran program utama yang ingin dicapai dalam serangkaian kegiatan sebagai tahapan identifikasi dan perumusan rencana aksi program, yang dimulai dari kegiatan identifikasi potensi dan permasalahan kawasan sehingga pada akhirnya dirumuskan rencana pentahapan program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan pada lokasi kawasan pengembangan. Mengacu kepada analisis yang telah dilakukan

sebelumnya dan survey lapangan kawasan kumuh di pilihlah kawasan prioritas sebagai program pengembangan dan penanganan infrastruktur kawasan permukiman kumuh. Usulan pengembangan wisata pesisir pantai sebagai kawasan wisata pantai dengan luas 1,01 Ha dan pengembangan RTH dengan lokasi aset tanah milik pemprov seluas 0,04 Ha atau sekitar 400 m².

Tabel 2 Program & Penanganan Prioritas Rencana Kawasan Permukiman Desa Dirgahayu Kecamatan Dirgahayu Kabupaten Kotabaru

Lokasi Kumuh	Program Usulan Penanganan Infrastruktur	Dokumentasi
Desa Dirgahayu RT.16 Kelurahan Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru	- Pembangunan saluran pembuangan air limbah rumah tangga; - Pembangunan septik tank komunal/ bio fill untuk pembuangan limbah padat sebagai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); - Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS); - Perbaikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan terbangun/non hijau (RTNH); - Pembangunan taman ramah anak; dan - Pengembangan wisata pantai, seperti pembangunan dermaga, penataan parkir dan lain-lain	 

Sumber: Hasil analisis, 2024



Gambar 6 Usulan lokasi pengembangan wisata pesisir pantai Kawasan Dirgahayu



Gambar 7 Rencana Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Terbangun



Gambar 8 Penataan Jalan Lingkungan (jalan Titian Kayu) Desa Dirgahayu



Gambar 9 Rencana Penataan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)



Gambar 10 Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal Desa/Kel. Dirgahayu



Gambar 11 Perencanaan Dermaga Nelayan Desa/Kel. Dirgahayu

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas berkaitan dengan Penataan Kawasan Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara yang layak huni dan berkelanjutan di Kabupaten Kotabaru dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan kawasan kumuh di Desa Dirgahayu untuk menciptakan kawasan permukiman yang sehat dan layak huni perlu diperhatikan standar teknis kawasan permukiman dan lingkungan yang berkelanjutan mengingat kawasan kumuh tersebut berada di pesisir pantai.
2. Penyediaan ruang terbuka hijau dan intensitas pemanfaatan lahan yang harus berimbang antara kawasan terbangun dan tidak terbangun, sebagai salah satu upaya penyediaan sarana dan prasarana umum di kawasan permukiman perkotaan.
3. Masyarakat dilibatkan dalam setiap proses perencanaan penataan kawasan permukiman sebagai dukungan terhadap warga setempat untuk mengangkat isu-isu sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.
4. Program penanganan kawasan prioritas merupakan program pembangunan permukiman layak huni dan berkelanjutan dapat mendukung perekonomian lokal, menciptakan lingkungan yang sehat dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi selanjutnya.

5. Saran

Sosialisasi penanganan kawasan kumuh kepada masyarakat perlu disesuaikan dengan kondisi sosial budaya yang ada di wilayah Desa Dirgahayu, tak jarang penolakan sering terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang penanganan kawasan permukiman kumuh sehingga pendekatan partisipatif dalam proses penyusunan penanganan kawasan permukiman kumuh ini dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan kota maupun pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan

Daftar Pustaka

- Ina Revayanti, 2023, *Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Sebagai Fungsi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Kalimantan Selatan*, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan;
- Ina Revayanti, Sajidin Mukhlis Gunawan, Peningkatan Kualitas Tata Ruang Kawasan Wisata Ziarah di Desa Satui Barat Kabupaten Tanah Bumbu, Volume 4 Number 11, November 2024 Regular Issue, at the latest with DOI information (e-ISSN 2775-3727 and p-ISSN 2775-3735).
- Undang-undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
- Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Permen PUPR No.2/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
- Permen Pu No.1/PRT/M/2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang RTRW Prov. Kalsel Tahun 2015-2035.
- Almadinah Putri Brilian, 2023, *"Pemerintah Dorong Pembangunan Rumah Layak Huni di Sekitar IKN, Ini Datanya"*, <https://www.detik.com/properti/berita/d-7037816/pemerintah-dorong-pembangunan-rumah-layak-huni-di-sekitar-ikn-ini-datanya>.
- Hanny Maria Caesarina, Irfan Zamzani, Cici Maryani Widayanti, Muhammad Rizqi Fatullah, 2023, *"Community Development in Barak's Slum Area Towards a Healthy and Livable Neighborhood in Kotabaru"*, <http://journal.urbangreen.co.id/index.php/omnicode>.
- Herliansyah, 2023, *"Pemkab Kotabaru Terima Kunjungan Pemprov Kalteng, Gali Informasi Penanganan Kawasan Kumuh"*, <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/12/05/pemkab-kotabaru-terima-kunjungan-pemprov-kalteng-gali-informasi-penanganan-kawasan-kumuh>.